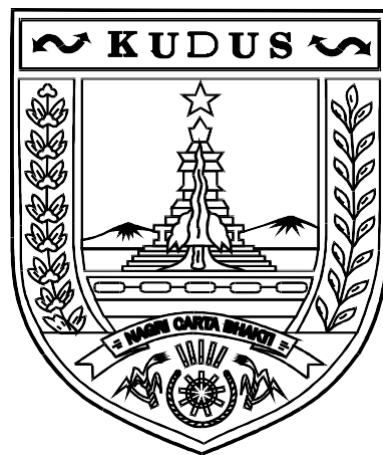


RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN UNDAAN TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kecamatan Undaan setelah adanya perubahan sesuai dinamika pelaksanaan program dan kegiatan.

Perubahan rencana kerja dilakukan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan rencana kerja Kecamatan Undaan harus berubah dengan pergeseran pagu kegiatan, pergeseran – pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja dan penambahan kegiatan.

Harapan kami semoga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2022, bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan tugas-tugas ke depan.

Kudus,

2022



ARIF BUDIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19730710 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN CAMAT UNDAAN	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	13
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
Tabel 3.1 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kab Kudus Tahun 2022	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022, Renstra Kecamatan Undaan Tahun 2018-2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rancangan awal Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan. Renstra Kecamatan Undaan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2022 yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan Tahun 2022, selaras dengan Renstra Kecamatan Undaan Tahun 2018-2023. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Undaan berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Undaan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Undaan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan Tahun 2022 didasarkan pada perkembangan yang tidak sesuai asumsi/perkiraan pelayanan, kebijakan pemerintah lebih tinggi atau aturan, yang berdampak pada pagu indikatif (bertambah atau berkurang), target kinerja atau menambah ataupun mengurangi kegiatan, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Kudus Nomor 218);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Kecamatan di Kabupaten Kudus ;
 17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan maksud untuk memberikan arah strategis sekaligus sebagai acuan resmi bagi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam memilih strategis untuk melaksanakan program prioritas sekaligus sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja pemerintah daerah tahunan.

Tujuan Perubahan Renja Kecamatan Undaan Tahun 2022 yaitu :

1. Memberikan landasan penyusunan KUA-PPAS Perubahan tahun 2022 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2022.
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal bagi masyarakat.
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2022.
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2022 disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2022.
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Kudus dengan seluruh potensi, kebutuhan dan pemecahan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Undaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi Kecamatan Undaan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kekuatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target maupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :1). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, 2). Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, 3).Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Belanja langsung anggaran Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 501.437.760,- sedangkan realisasi anggaran per 30 Juni 2022 (Triwulan II) adalah sebesar Rp. 224.136.194,- atau secara proporsi pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 44.69% dan pencapaian realisasi fisik adalah 44.69%. Adapun rekapitulasi pencapaian program beserta kegiatannya sampai dengan triwulan II sebagaimana tabel 2.1, selengkapnya dapat diurai sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Kebudayaan** Kinerja program ini dapat dilihat dari realisasi keuangan dan fisik Program pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan masing-masing sebesar 0% dan 0% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 0,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 6.271.000,-
2. **Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat** program ini dapat dilihat dari realisasi keuangan dan fisik Program pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan masing-masing sebesar 0% dan 0% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 0,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 0,- karena terdampak rasionalisasi anggaran
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Terdiri dari :
 - a. **Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kinerja Program ini dapat dilihat dari Realisasi Keuangan an Fisik Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah masing – masing sebesar 50.00% dan 50% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 600.000,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,-

- b. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kinerja Program ini dapat dilihat dari Realisasi Keuangan an Fisik Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah masing – masing sebesar 100% dan 100% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 600.000,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 600.000,-
- c. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Kinerja Program ini dapat dilihat dari Realisasi Keuangan an Fisik Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah masing – masing sebesar 0% dan 0% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 0,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 0,- karena terdampak refocusing anggaran.
- d. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kinerja Program ini dapat dilihat dari Realisasi Keuangan an Fisik Program Administrasi Umum Perangkat Daerah masing – masing sebesar 46,25% dan 42,2% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 11.769.000,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 27.750.300,- karena terdampak refocusing anggaran.
- e. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kinerja Program ini dapat dilihat dari Realisasi Keuangan an Fisik Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masing – masing sebesar 48,33% dan 42,45% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 87.893.474,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 205.069.460,- karena terdampak refocusing anggaran.
- f. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kinerja Program ini dapat dilihat dari Realisasi Keuangan an Fisik Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masing – masing sebesar 64,5% dan 59,92% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 50.020.620,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 110.031.000,- karena terdampak refocusing anggaran.
4. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** program ini dapat dilihat dari realisasi keuangan dan fisik Program pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan masing-masing sebesar 0% dan 0% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 0,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 0,- karena terdampak refocusing anggaran
5. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** program ini dapat dilihat dari realisasi keuangan dan fisik Program pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan masing-masing sebesar 24.63% dan 24.63% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 7.896.500,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 32.069.000,- karena terdampak refocusing anggaran.
6. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** program ini dapat dilihat dari realisasi keuangan dan fisik Program pelayanan

administrasi dan pelaporan keuangan masing-masing sebesar 54% dan 48.02% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 18.104.000,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 37.700.000,- karena terdampak refocusing anggaran.

7. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** program ini dapat dilihat dari realisasi keuangan dan fisik Program pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan masing-masing sebesar 66% dan 58,95% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 25.599.500,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 43.420.000,- karena terdampak refocusing anggaran.
8. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** program ini dapat dilihat dari realisasi keuangan dan fisik Program pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan masing-masing sebesar 28,67% dan 24,55% besaran anggaran yang telah terealisasi adalah Rp. 9.826.000,- dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 33.558.000,- karena terdampak refocusing anggaran.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Belanja Tidak langsung pada Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.297.561.240,- sedangkan realisasi anggaran per 30 Juni 2022 (Triwulan II) adalah sebesar Rp. 970.853.915,- atau secara proporsi pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 42,26%. Kinerja Pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran Kecamatan Undaan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Undaan Kabupaten Lebih rinci diuraikan sebagaimana tabel 2.2

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi umum Kecamatan Undaan maka identifikasi lingkungan strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Undaan adalah :

- a. Masih adanya sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum optimal.
- b. Belum adanya pemberian punishment yang mampu mendorong kinerja pegawai.

Adapun isu strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan publik yang mengacu visi dan misi Bupati Kudus sebagai berikut :

- a. Tanggul Kali Wulan yang melewati Desa Undaan Lor dan Desa Medini semakin kritis maka perlunya normalisasi sungai dan penataan dan peninggian tanggul.
- b. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Bumdes diharapkan mengangkat UMKM di wilayah Kecamatan Undaan.

Tabel 2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGA		SISA PAGU ANGGARAN
			Rp.	%	
5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.378.537.240	970.853.915	41%	1.407.683.325
5.1.1	Belanja Pegawai	2.378.537.240	970.853.915	41%	1.407.683.325
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	964.600.000	541.458.500	56%	513.141.500
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	108.556.000	50.590.988	47%	57.965.012
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	88.200.000	38.350.000	43%	49.850.000
5.1.1.01.05	Tunj. Fungsional Umum	35.630.000	12.645.000	35%	22.985.000
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	60.100.000	28.026.540	47%	32.453.460
5.1.1.01.07	Tunj. PPh/Tunj. Khusus	4.100.000	1.592.229	39%	2.507.771
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	200.240	5.119	3%	195.121
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	93.077.000	29.850.003	32%	63.226.997
5.1.1.01.10	iuran jam. Kecelakaan	13.986.000	921.026	7%	1.654.974
5.1.1.01.11	iuran jam. Kematian	7.728.000	2.763.117	36%	4.964.883
5.1.1.01.12	Tapera	7.998.000	0	0%	7.998.000
5.1.1.02.01	Tam. Penghasilan PNS Beban Kerja	661.391.481	257.045.018	39%	404.346.463
5.1.1.02.03	Tam. Penghasilan PNS Kondisi Kerja	344.000.519	97.606.375	28%	246.394.144

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.04.0000 KECAMATAN UNDAAN PERIODE PELAKSANAAN 2022
TRIWULAN II

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.642.212		411.081		718.656		0		0		1.129.737		42,76	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Undaan)	80,6 Indeks		90,77		90,79		0		0		90,79		112,64		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.200		600		0		0		0		600		50	
		Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan yang tersusun	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			600		600		0		0		0		600		100	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (LKJIP, LPPD, RKPD/Ranwal, RKA, DPA, Laporan Evaluasi Renja)	6 dokumen		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.298.161		322.360		649.093		0		0		971.454		42,27	
		Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.297.561		321.760		649.093		0		0		970.854		42,26	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			600		600		0		0		0		600		100	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.750		6.773		4.996		0		0		11.769		42,41	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.974		1.430		500		0		0		1.930		32,31	kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah alat tulis yang tersedia	4 jenis		4		0		0		0		4		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.535		1.113		1.064	0	0				2.177		48	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah bahan logistik kantor tersedia	11 kali		3		8		0	0				11		100	
		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis		8		0		0	0				8		100	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.203		1.334		1.768	0	0				3.102		43,07	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah makanan minuman harian, rapat dantamu	4 jenis		4		0		0	0				4		100	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.038		2.896		1.664	0	0				4.560		45,43	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 jenis		1		0		0	0				1		100	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			205.069		47.034		40.860	0	0				87.893		42,86	
		Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		3		3		0	0				6		50	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.100		350		150	0	0				500		45,45	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 jenis		1		0		0	0				1		100	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.554		12.860		9.112	0	0				21.971		36,28	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	4 jenis		4		0		0	0				4		100	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			143.415		33.824		31.598	0	0				65.422		45,62	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah honorarium panitia pelaksana kegiatan, tenaga pelaksana keg adm perkantoran dan premi asuransi terbayar	10 orang		10		0		0	0				10		100	
		Jumlah honorarium tenaga pelaksanaan keg kebersihan kantor, jumlah tenaga honorer/tidak tetap kebersihan kantor da premi asuransi yang terbayar	2 orang		2		0		0	0				2		100	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.031		34.314		23.707	0	0				58.021		52,73	
		Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kecamatan Undaan)	12 bulan		3		3		0	0				6		50	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			16.431		10.646		938	0	0				11.584		70,5	kegiatan berjalan dengan baik

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas yang tersedia (perpanjanganSTNK, KIR dan jasa servis)	14 unit		14		0		0		0		14		100		
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas terbayar (belanja BBM, ganti oli dan suku cadang)	14 unit		14		0		0		0		14		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			93.600		23.668		22.769		0		0		46.437		49,61	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan pengamanan kantor dan premiasuransi yang terbayar	3 orang		3		0		0		0		3		100		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			6.270		0		0		0		0		0		0	
		cakupan pengembangan kebudayaan (undaan)	100 %		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.270		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah fasilitasi pentas seni dan budayalokal	3 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			6.270		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah fasilitasi penta seni dan pelestarian budaya lokal yang terlaksanakan	3 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			35.839		8.629		3.095		0		0		11.724		32,71	
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (undaan)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			35.839		8.629		3.095		0		0		11.724		32,71	
		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa	16 desa/kelurahan		16		0		0		0		16		100		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			35.839		8.629		3.095		0		0		11.724		32,71	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	1 desa		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah pelaksanaan monev dan pelaporandana desa	16 desa		16		0		0		0		16		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM			37.700		10.694		7.410		0		0		18.104		48,02	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (undaan)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			37.700		10.694		7.410		0		0		18.104		48,02	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Cakupan kegiatan koordinasi TrantibUmum	16		16		0		0		0		16		100		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			37.700		10.694		7.410		0		0		18.104		48,02	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah piket bencana	6 bulan		6		0		0		0		6		100		
		Jumlah posko PB yang terpantau	17 posko		17		0		0		0		17		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			43.420		10.216		15.384		0		0		25.600		58,96	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (undaan)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			43.420		10.216		15.384		0		0		25.600		58,96	
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16		16		0		0		0		16		100		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			43.420		10.216		15.384		0		0		25.600		58,96	kegiatan berjalan dengan baik
		Honorarium piket kantor	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
		Pelatihan satlinmas dalam penanggulanganbencana	0 desa		0		0		0		0		0		0		
		Rakor kadus	40 orang		0		0		0		0		0		0		
		Rakor satlinmas	40 orang		0		0		0		0		0		0		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			33.558		2.390		7.436		0		0		9.826		29,28	
		cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (undaan)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa			33.558		2.390		7.436		0		0		9.826		29,28	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	16		16		0		0		0		16		100		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			7.956		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah perdes terevaluasi	100 persen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			18.421		0		7.436		0		0		7.436		40,37	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	0 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah aparatur desa yang mengikutipelatihan pengelolaan keuangan desa	0 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desayang terfasilitasi	16 desa		0		16		0		0		16		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			7.181		2.390		0		0		0		2.390		33,28	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah pelaksanaan musrenbang tk. Kecamatan yang terlaksana	1 kali		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				2.798.999		1.194.990								1.194.990			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															77,14	42,69	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya solidaritas dan meningkatnya koordinasi antar seksi di Kecamatan Undaan, kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi desa sudah berjalan dengan baik dan lancar secara periodik, sehingga menjadikan koordinasi yang lebih terpadu dan sinergis.</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kurangnya anggaran yang memadai sehingga kegiatan belum bisa maksimal</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pertahankan capaian target sesuai dengan rencana kegiatan, namun perlu sinkronisasi pada serapan anggarannya</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Perhatikan target datang, sesuaikan dengan kondisi saat itu agar hasil dpt tercapai maksimal</p>																	

Kudus, 2022

Dievaluasi oleh,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
PEMERINTAH DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BAPPEDA

ABDUL KHAFIYAH NOOR, SH
Pembina
NIP. 38700803 198903 2 001

Kudus, 2022

Disusun oleh,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN UNDAAN

ARIF BUDIYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. (IV/b)
NIP. 19730710199303 1 003

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2022, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Undaan Renja Perubahan Kec. Undaan Tahun 2022 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Undaan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Undaan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan Tahun 2022 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

RKPD Perubahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar semula Rp. 3.598.470.300 karena terdampak refocusing anggaran menjadi Rp. sebesar Rp. 2.798.999.000,- bertambah sebesar Rp. 963.869.170,- sebagai rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pengurangan anggaran belanja Gaji dan Tunjangan ASN karena penyesuaian Plafon Gaji sebesar Rp. 2.297.561.240 menjadi Rp. 2.411.959.110
 - **Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** penambahan anggaran belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik, Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistic, penyediaan barang cetakan dan pengadaan sebesar Rp. 9.462.500,-
 - b. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** penambahan anggaran belanja BBM 3 bulan dan pemeliharaan servis kendaraan dinas Roda Empat (Expander, Avanza dan Patroli) sebesar Rp. 70.725.000,-
2. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - **Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketertiban Peraturan Perundang - Undangan** penambahan anggaran belanja lembur / piket kantor dan Pelatihan Satlinmas sebesar Rp. 413.463.800,-

3. Progam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa** penambahan anggaran Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 355.820.000,-

Perincian dan perbandingan antara Renja Penetapan dengan perubahan Rencana kerja akan dituangkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional					Daerah
2																			
2																			
2	UR U																		
2	22	02																	
2	22	02	02																
2	22	02	2.02																
2	22	02	2.02	01															
4																			
4	01																		
4	01	02																	
4	01	02	2.02																
4	01	02	2.02	01															
7																			
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2.01																
7	01	01	2.01	01															
7	01	01	2.01	07															
7	01	01	2.02																
7	01	01	2.02	01															
7	01	01	2.02	03															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional					Daerah
	Keuangan SKPD										Kelurahan								
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	27,734,400	27,750,300	41,978,800					12 bulan	76,712,000			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor				0 jenis	3 jenis	0	0	1,065,500	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	3 jenis	7,260,000	KECAMATA NUNDAAN	Penambahan anggaran belanja alat listrik
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia				4 jenis	12 jenis	5,958,000	5,974,000	12,842,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	12 jenis	15,196,000	KECAMATA NUNDAAN	Penambahan anggaran belanja alat tulis kantor
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan logistik kantor tersedia Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				11 kali 8 jenis	11 kali 22 jenis	4,535,000	4,535,000	8,401,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	11 kali 22 jenis	10,642,000	KECAMATA NUNDAAN	Penambahan anggaran belanja Peralatan rumah tangga
7 01 01 2.06 04	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jumlah makanan minuman harian, rapat dan tamu				4 jenis	6 jenis	7,203,000	7,203,000	9,152,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	6 jenis	10,100,000	KECAMATA NUNDAAN	Penambahan anggaran belanja Logistik
7 01 01 2.06 05	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia				1 jenis	2 jenis	10,038,400	10,038,300	10,518,300	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	2 jenis	19,534,000	KECAMATA NUNDAAN	Penambahan anggaran belanja Penggandaan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang tersedia				0 jenis	0 jenis	0	0	0	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	0 jenis	4,600,000	KECAMATA NUNDAAN	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah				0 OH	0 OH	0	0	0	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	0 OH	9,380,000	KECAMATA NUNDAAN	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	202,830,000	205,069,460	203,913,460					12 bulan	235,100,000			
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah jasa surat menyuratyang tersedia				1 jenis	1 jenis	1,100,000	1,100,000	1,100,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	1 jenis	3,100,000	KECAMATA NUNDAAN	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet				4 jenis	4 jenis	78,330,000	60,554,460	60,298,460	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	4 jenis	72,000,000	KECAMATA NUNDAAN	Pergeseran anggaran belanja
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium panitia pelaksana kegiatan, tenaga pelaksanaan keg adm perkantoran dan premi asuransi terbayar Jumlah honorarium tenaga pelaksanaan keg kebersihan kantor, jumlah tenaga honorer/tidak tetap kebersihan kantor da premi asuransi yang terbayar				10 orang 2 orang	10 orang 2 orang	123,400,000	143,415,000	142,515,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	10 orang 2 orang	160,000,000	KECAMATA NUNDAAN	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah (Kecamatan Undaan)	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah (Kecamatan Undaan)	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	82,885,000	110,031,000	180,756,000					12 bulan	196,530,000			
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas yang tersedia (perpanjangan STNK, KIR				14 unit 14 unit	14 unit 14 unit	5,935,000	16,431,000	87,156,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	14 unit 14 unit	88,000,000	KECAMATA NUNDAAN	Penambahan anggaran belanja BBM selama 45 hari dan pemeliharaan rutin /berkala kendaraa dinas 3 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional					Daerah
	Operasional atau Lapangan	dan jasa servis) Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas terbayar (belanja BBM,ganti oli dan suku cadang																	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan pengamanan kantor dan premi asuransi yang terbayar				3 orang	3 orang	76,950,000	93,600,000	93,600,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	3 orang	100,500,000	KECAMATAN NUNDAAN	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan kantor yang tersedia				0 paket	0 paket	0	0	0	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	0 paket	8,030,000	KECAMATAN NUNDAAN	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Undaan)	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	7,000,000		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	desa/kelurahan		desa/kelurahan	desa/kelurahan	desa/kelurahan	desa/kelurahan	desa/kelurahan	desa/kelurahan						0 desa/kelurahan	7,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan				0 kali	0 kali	0	0	0	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Memertakan	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	0 kali	7,000,000	KECAMATAN NUNDAAN	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (undaan)	%		%	100 %	100 %	35,839,000	35,839,000	35,839,000						100 %	111,386,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa	desa/kelurahan		desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	35,839,000	35,839,000	35,839,000						16 desa/kelurahan	111,386,000		
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pameran UMKM yang terlaksana				0 kali	0 kali	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	0 kali	12,000,000	KECAMATAN NUNDAAN	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Jumlah organisasi perempuan yang dibina Jumlah pelaksanaan monev dan pelaporan dana desa				1 desa 1 organisasi 16 desa	1 desa 1 organisasi 16 desa	35,839,000	35,839,000	35,839,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	1 desa 1 organisasi 16 desa	99,386,000	KECAMATAN NUNDAAN	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan kegiatan koordinasi tranrib umum (undaan)	%		%	100 %	100 %	37,700,000	37,700,000	37,700,000						100 %	74,700,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan kegiatan koordinasi Tranrib Umum	desa/kelurahan		desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	37,700,000	37,700,000	37,700,000						16 desa/kelurahan	74,700,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah piket bencana Jumlah posko PB yang terpantau				6 bulan 17 posko	6 bulan 17 posko	37,700,000	37,700,000	37,700,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	kecamatan Undaan	6 bulan 17 posko	74,700,000	KECAMATAN NUNDAAN	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN NURUSAN PEMERINTAHAN	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (undaan)	%		%	100 %	100 %	43,420,000	43,420,000	456,883,800						100 %	95,900,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional					Daerah
UMUM																			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	desa/kelurahan		desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	43,420,000	43,420,000	456,883,800					16 desa/kelurahan	95,900,000	Penambahan anggaran pelatihan satlinmas dalam penanggulangan bencana		
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Kelentuan/Peraturan Perundang-Undangan	Honorarium piket kantor Pelatihan satlinmas dalam penanggulangan bencana				12 bulan 0 desa	12 bulan 1 kegiatan	43,420,000	43,420,000	456,883,800	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	12 bulan 1 kegiatan	95,900,000	KECAMATAN NUNDAAN	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (undaan)	%		%	100 %	100 %	33,558,000	33,558,000	385,768,000					100 %	50,171,000			
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	desa/kelurahan		desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	33,558,000	33,558,000	385,768,000					16 desa/kelurahan	50,171,000			
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah perdes terevaluasi				100 persen	100 persen	7,956,000	7,956,000	7,956,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	100 persen	9,956,000	KECAMATAN NUNDAAN	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi				0 orang 16 desa	262 orang 16 desa	18,421,000	18,421,000	374,241,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	262 orang 16 desa	31,044,000	KECAMATAN NUNDAAN	Penambahan anggaran pelatihan satlinmas manajemen pemerintah desa
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan musrenbang tk. Kecamatan yang terlaksana				1 kali	1 kali	7,181,000	7,181,000	3,571,000	Kab. Kudus, Undaan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Undaan	1 kali	9,171,000	KECAMATAN NUNDAAN	Pergeseran anggaran belanja
TOTAL								3,439,830,400	2,798,999,000	3,762,868,170					4,135,819,000				

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk memberikan arah dan pedoman ke depan, sekaligus berfungsi sebagai parameter atau tolok ukur penilaian kinerja suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja memberikan gambaran Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimana pencapaian target sarannya telah ditetapkan dengan indikator yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator kinerja, target program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja, diharapkan ada panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sebagai upaya penyelesaian berbagai permasalahan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasayarakatan serta pelayanan umum untuk mewujudkan visi Kecamatan Undaan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat Undaan dengan penyajian secara sistematis, mencakup keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta target dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Kudus,

2022



ARIF BUDIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19730710 199303 1 003

Lampiran : Camat Undaan

Nomor :

Tanggal :

Agustus 2022

Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√		
2.	Kesesuaian dasar hukum	√		
3.	Pengolahan data dan informasi	√		
4.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	√		
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (termasuk faktor penghambat dan rencana tindak lanjut)	√		
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	√		
7.	Menyajikan usulan dan revisi program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan	√		
8.	Mempertajam dan menyesuaikan indikator dan target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah	√		
9.	Pendanaan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dan telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√		
10.	Penjelasan atas alasan perubahan RKPD terhadap RKPD awal (terkait perubahan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, pagu (termasuk DAK, Bangub, Gaji, TPP, DBHCHT, BTT, tambahan/pengurangan dan pergeseran)), yang dituangkan dalam isu penting dan atau faktor yang menjadi bahan pertimbangan perubahan pagu indikatif dan rumusan program kegiatan sub kegiatan	√		
11.	Program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD	√		
12.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan	√		

Kudus,

2022



GAMAT UNDAAN,

ARIF BUDIYANTO, S.Sos, MSi

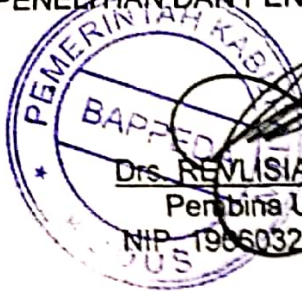
Pembina Tk I

19730710 199303 1 003

Form Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Kecamatan Undaan :

No	Uraian	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Kesesuaian dasar hukum	✓			
3.	Pengolahan data dan informasi	✓			
4.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	✓			
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (termasuk faktor penghambat dan rencana tindak lanjut)	✓			
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	✓			
7.	Menyajikan usulan dan revisi program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan	✓			
8.	Mempertajam dan menyesuaikan indikator dan target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah	✓			
9.	Pendanaan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dan telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
10.	Penjelasan atas alasan perubahan RKPD terhadap RKPD awal (terkait perubahan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, pagu (termasuk DAK, Bangub, Gaji, TPP, DBHCHT, BTT, tambahan/pengurangan dan pergeseran)), yang dituangkan dalam isu penting dan atau faktor yang menjadi bahan pertimbangan perubahan pagu indikatif dan rumusan program kegiatan sub kegiatan		✓	blm dilampiri Manual dan Analisis msk thd pemb.	
11.	Program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD	✓			
12.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan		✓	Blm dilampiri	Monon dilampiri RPD perub 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Drs. REVLISANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006



ARIF BUBIYANTO, S.Sos, MSi
Pembina Tk I
NIP. 19730710 199303 1 003

TELAH DIVERIFIKASI

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris	1
2.	Kepala Bidang	2
3.	Kasubid/Subkoordinator	3
4.	MitraPD	4



KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN CAMAT UNDAAN
NOMOR : 050.2.4/ 14 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN UNDAAN
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN UNDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

CAMAT UNDAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan program Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dengan perkembangan keadaan, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja, perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Undaan oleh Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Kecamatan di Kudus;
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT UNDAAN KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Rencana Kerja Kecamatan Undaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengumpulkan data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan guna penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan;
 - b. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan;
 - c. merumuskan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan;
 - d. menyajikan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan;
 - e. menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Undaan dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Undaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
 Tanggal : Juli 2022



Lampiran SK Camat Undaan

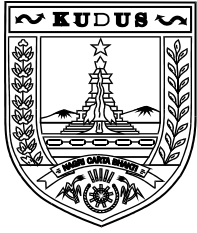
Nomor : 050.2.4/ 14 /2022
 Tentang : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja
 Tanggal : Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENJA KERJA (RENJA)
 KECAMATAN UNDAAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Arif Budiyanto, Sos, M.Si	Camat	Ketua
2	Bambang Santoso, S.IP	Sekretaris	Sekretaris
3	Ismawati, SE	Kasi. Tata Pemerintahan	Ketua Kelompok Kerja
4	S K Sadyanigtyas, S.IP	Kasubbag PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja
5	Retno Sri Widanarti, SE	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota Kelompok Kerja
6	Mohammad Syafrudin, ST	Kasi. Ekonomi dan Pembangunan	Anggota Kelompok Kerja
7	Andy Suryanto, SE	Kasi. Pelayanan Umum	Anggota Kelompok Kerja
8	Drs. Abdul Wakhid	Kasi. Kesejahteraan Rakyat	Anggota Kelompok Kerja
9	Sugeng Harjono	Staf Subbag. PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja
10	Umi Faidah	Staf Subbag. PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja

Ditetapkan di : Kudus
 Tanggal : Juli 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN UNDAAN
Jl. Raya Kudus – Purwodadi KM 12 Telp(0291) 433400
KUDUS

KEPUTUSAN
CAMAT UNDAAN KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 050.2.4 / 14 /31.01/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

CAMAT UNDAAN,

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Undaan Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupateen Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Kecamatan di Kudus;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk periode I (satu) tahun yang memuat kebijakan, progam dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal

